



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

<https://www.ainamunirana.com>

LAMPIRAN CCLII
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 646 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN HUKUM
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK SIPIL	2	WALIKOTA BATU , DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 PENDIDIKAN USAHA PERJALANAN WISATA	3	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNIK GEODESI	3	WALIKOTA BATU , DINAS PERHUBUNGAN
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KESELAJUTAN SOSIAL;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 BIOLOGI	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU HUKUM	3	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KELAUTAN;S-1 KIMIA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT , BAGIAN KESELAJUTAN RAKYAT
10.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 GEOGRAFI;S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN;S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN KEPERAWATAN;S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN;S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA	1	WALIKOTA BATU , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	2	WALIKOTA BATU , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
12.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
13.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DATA PERIKANAN	1	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
15.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU HUKUM	3	WALIKOTA BATU , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
17.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	WALIKOTA BATU , DINAS SOSIAL
18.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	WALIKOTA BATU , DINAS TENAGA KERJA
19.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3	WALIKOTA BATU , BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
20.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNIK PENERBANGAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS KESEHATAN
21.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU HUKUM;S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 PENDIDIKAN TATA NIAGA;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH;S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3	WALIKOTA BATU , DINAS PENDIDIKAN
22.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
23.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK;S-1 AGRONOMI;S-1 KEHUTANAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
24.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESRA , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
25.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK TEKSTIL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 SENI;S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TELEVISI DAN FILM	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
26.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN HUKUM
27.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN DAN CIGUDA
29.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK MESIN;S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI;S-1 SASRA INGGRIS;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH
30.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 BUDIDAYA HUTAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
31.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
32.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	3	WALIKOTA BATU , KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
33.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
36.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU HUKUM	1	WALIKOTA BATU , KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
37.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
38.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 STATISTIKA TERAPAN;S-1 ILMU PERPUSATAKAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
39.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH
40.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
41.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SASRA INGGRIS	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
42.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN;S-1 TEKNIK GEODESI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
43.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU HUKUM	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
44.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
45.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN PEMERINTAHAN
46.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS SOSIAL
47.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PENDIDIKAN
48.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
49.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KESEHATAN
50.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK MESIN	2	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
52.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK GEODESI	3	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
53.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 PSIKOLOGI	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
54.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PRODUKSI PETERNAKAN	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN
55.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
56.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN	3	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
57.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 HUKUM;S-1 TEKNIK SIPIL	1	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
59.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	3	WALIKOTA BATU , CAMAT BATU
60.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	3	WALIKOTA BATU , CAMAT BUMIAJI
61.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2	WALIKOTA BATU , DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
62.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 ILMU HUKUM		WALIKOTA BATU , DINAS SOSIAL
63.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , CAMAT JUNREJO
64.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI;S-1 KIMIA	1	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
65.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SENI TARI	2	WALIKOTA BATU , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
66.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 MANAJEMEN	3	WALIKOTA BATU , KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
67.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUKUM	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
68.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
69.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS;S-1 FISIKA	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
70.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
71.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
72.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SASTRA JEPANG;S-1 SASTRA PERANCIS;S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , DINAS PARIWISATA
73.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 AKUNTANSI	1	WALIKOTA BATU , CAMAT JUNREJO
74.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
75.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
76.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
77.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI	2	WALIKOTA BATU , DINAS TENAGA KERJA
78.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN;S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN	2	WALIKOTA BATU , DINAS PENDIDIKAN

TENAGA TEKNIS

NÖ.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
79.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESRA , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
80.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK INDUSTRI,S-1 MANAJEMEN	1	WALIKOTA BATU , DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
81.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUKUM	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
82.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN,S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA	3	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PERPAJAKAN,S-1 ILMU KOMUNIKASI,S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL,S-1 ILMU POLITIK,S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
84.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
85.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN,S-1 MATEMATIKA	1	WALIKOTA BATU , CAMAT BATU
86.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK PERTANIAN	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
87.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTAMIAN	1	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH
88.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	WALIKOTA BATU , DINAS SOSIAL
89.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN KELANGAN,S-1 AKUNTANSI	1	WALIKOTA BATU , INSPEKTORAT
90.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN,S-1 KOMPUTER APLIKASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
91.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN,S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
92.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN,S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERHUBUNGAN
93.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
94.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN HUKUM
95.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA,S-1 AKUNTANSI,S-1 MANAJEMEN	3	WALIKOTA BATU , DINAS KESEHATAN
96.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	WALIKOTA BATU , CAMAT BUMIAJI
97.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU MANAJEMEN	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
98.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN,S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEJAYANAN TERPADU SATU PINTU
99.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN	2	WALIKOTA BATU , DINAS TENAGA KERJA
100.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 AKUNTANSI,S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
101.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI,S-1 SAstra INDONESIA,S-1 SAstra INGGRIS	1	WALIKOTA BATU , DINAS PARIWISATA
102.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
103.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN,S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
104.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 BAHASA DAN SAstra INGGRIS,S-1 ILMU KOMUNIKASI,S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA,S-1 AGAMA ISLAM	3	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
105.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN,S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	WALIKOTA BATU , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
106.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA,S-1 SAstra INGGRIS,S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
107.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
108.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
109.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
110.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
111.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM
112.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , KANTOR KRATON BANGSA DAN POLITIK
113.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH
114.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
115.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
116.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
117.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KESEHATAN
118.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA		WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
119.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	18	WALIKOTA BATU , DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
120.	PEMULA - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SMA IPA;SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG;SMK DESAIN INTERIOR DAN TEKNIK FURNITUR;SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN;SMK TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	8	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
121.	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	SMA IPA;SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN;SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG;SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN;SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI	8	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
122.	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMA IPA;SMA IPS;SMK	5	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
123.	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SMA IPA;SMK MESIN;SMK OTOMOTIF;SMK ELEKTRO	5	WALIKOTA BATU , DINAS PERHUBUNGAN
124.	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT;SMK	18	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
125.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III BAHASA INGGRIS	1	WALIKOTA BATU , DINAS PARIWISATA
126.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III HORTIKULTURA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN
127.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ANALIS KIMIA;D-III TEKNIK ELEKTRO;D-III AKUNTANSI	3	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
128.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
129.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN PEMASARAN	1	WALIKOTA BATU , CAMAT BATU
130.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III AGRIBISNIS PERIKANAN	2	WALIKOTA BATU , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
131.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III TEKNIK ELEKTRO	2	WALIKOTA BATU , DINAS PENDIDIKAN
132.	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	D-III ADMINISTRASI KEUANGAN;D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
133.	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBRATAN	D-III TEKNIK SIPIL	1	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
134.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERHUBUNGAN
135.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
136.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
138.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
139.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
140.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	2	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
141.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PEMBERDAYAAN PERMUKYAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
142.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
143.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
144.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
145.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH
146.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	WALIKOTA BATU , DINAS TENAGA KERJA
147.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA BATU , CAMAT BUMIAJI
148.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
149.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS KESEHATAN
150.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS PARIWISATA
151.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , INSPEKTORAT
152.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
153.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
154.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , CAMAT BATU
155.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN PEMERINTAHAN
156.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESRA . BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
157.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI	1	WALIKOTA BATU , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
158.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP
159.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI	2	WALIKOTA BATU , DINAS SOSIAL
160.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , BAGIAN HUKUM
161.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA BATU , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN
162.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA BATU , CAMAT JUNREJO
163.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
164.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
165.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	WALIKOTA BATU , SATUAN FOLISI PAMONG PRAJA
TOTAL			303	